

NARKOBA & POLITIK

Oleh :

Anton Suriyadi Siagian, S.H.,M.H

antonsiagian777@gmail.com

ABSTRAK

Jaringan pengedar narkoba di Indonesia dengan cepat meluas, bukan hanya di kota besar, tetapi juga di kotamadya, bahkan desa-desa. Meluasnya jaringan narkoba didorong oleh rendah nya kualitas intelektualitas dan moralitas masyarakat dan buruknya kondisi sosial ekonomi, Perdagangan narkoba adalah bisnis yang menggiurkan banyak orang karena buruknya kondisi ekonomi masyarakat Indonesia saat ini.

Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang artinya negara. Dalam arti luas, politik adalah suatu aktivitas yang dibuat, dipelihara, dan di gunakan untuk masyarakat untuk menegakkan peraturan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri.

Arah kebijakan hukum pidana atau politik criminal merupakan upaya rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Dalam hal ini prof. Sudarto mengemukakan bahwa politkk criminal dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana.

I. PENDAHULUAN

Penyalahguna narkoba telah menjadi fenomena global yang mempengaruhi semua dunia, tahun 2020 di perkirakan sekitar 35,6 juta menderita gangguan penyalahguna narkoba sebanyak 284 juta berusia 15-64 tahun, telah menggunakan narkoba dalam 12 bulan terakhir, dampak penyalahguna narkoba kepada Kesehatan, keamanan public, kejahatan, produktivitas, dan tata Kelola, penyalahguna narkoba berpengaruh negative pada daya saing perekonomian sebuah bangsa karena tingkat produktivitas menjadi rendah terutama pada generasi muda.¹

²Bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia sebagai negara kepulauan letak dan kondisi geografis memiliki kemajemukan berbagai suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia, kondisi geografis yang strategis dalam menghadapi era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, informasi dan transportasi dapat berdampak positif atau negatif terhadap kepentingan Nasional. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang

¹Uji Publik BNN Penelitian Pengukuran Pravelensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023

² <https://universitaskota.ac.id/books/tindak-pidana-narkotika-lex-specialis-derogat-legi-generalis/>

merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia 1945, perlu ditingkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional termasuk derajat kesehatannya.

³Politik (serapan dari bahasa Belanda: politiek) adalah proses pembentukan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini adalah upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Ini dapat digunakan secara positif dalam konteks solusi politik yang berkompromi dan tanpa kekerasan, atau secara diskriptif sebagai seni atau ilmu pemerintahan, tetapi juga sering membawa konotasi negatif. Konsep setelah didefinisikan dalam berbagai cara, dan pendekatan yang berbeda memiliki pandangan yang berbeda secara mendasar tentang apakah itu harus digunakan secara luas atau terbatas, secara empiris atau normatif, dan apakah konflik atau kerjasama lebih penting untuk itu.

II. LANDASAN TEORI

Secara normatif politik merupakan sebuah bentuk usaha untuk mewujudkan serta mencapai masyarakat politik (polity) yang terbaik, di dalam polity manusia akan hidup damai serta bahagia karena memiliki peluang untuk

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Politik>

mengembangkan bakat, bergaul dengan rasa kemasyarakatan yang akrab dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi.

⁴Budiardjo menyatakan bahwa politik merupakan berbagai kegiatan dalam sebuah sistem politik (atau negara) yang terkait proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem serta melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Decision making atau

pengambilan keputusan mengenai tujuan dari sebuah sistem politik berkenaan dengan seleksi antara beberapa alternatif serta skala prioritas dari berbagai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Thomas P.Jenkin dalam the study of political theory dibedakan dua macam teori politik. Sekalipun perbedaan antara kedua kelompok teori tidak bersifat mutlak. (dalam Budiharjo,1992:30)

- Teori-teori yang mempunyai dasar moral dan menentukan norma-norma politik. Karena adanya unsur norma-norma dan nilai, maka teori-teori ini boleh dinamakan valuitional (mengandung nilai). Yang termasuk golongan ini antara lain filsafat politik, teori politik sistematis, ideologi dan sebagainya;
- Teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Teoriteori ini dapat dinamakan nonvaluitional, biasanya bersifat deskriptif dan komparatif dan berusaha untuk membahas fakta-fakta kehidupan

⁴ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)

politik sedemikian rupa sehingga dapat disistematiskan dan disimpulkan

dalam generalisasi-generalisasi.

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah. Dengan kata lain, yaitu perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, pelaku tindak pidana kejahatan dapat dikatakan telah mempunyai latar belakang yang ikut mendukung terjadinya kriminalitas tersebut, sebagai contoh seorang yang hidup di lingkungan yang rawan akan tindak kriminal, maka secara sosiologis jiwanya akan terpengaruh oleh keadaan tempat tinggalnya.

Menurut Jackobus (2005), narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat, selain itu juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak lepas dari pengaruhnya.⁵

Narkoba adalah singkatan dari Narkoba dan Obat Berbahaya dan salah satu jenis obat penghilang rasa sakit yang sering disalahgunakan oleh manusia. Narkoba telah ada 2000 Sebelum Masehi, dikenal dengan sari bunga opion atau

⁵Setiyawati, dkk, Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 1, (Surakarta, Tirta Asih Jaya, 2015)

kemudian dikenal opium (candu = *papaver somniferitum*). Sifat opium memiliki sifat yang mematikan rasa, analgesik dan depresan umum serta mengandung lebih dari 20 jenis alkoid (bahan alami nabati yang bersifat basa, mengandung unsur nitrogen dalam unsur kecil, berasa pahit, dan besar pengaruhnya terhadap sistem kerja tubuh)⁶

Narkoba merupakan bahan atau zat aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan⁷

III. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normative yaitu pendekatan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan mengumpulkan informasi-informasi tentang kenyataan yang terjadi dilapangan guna mendapatkan fakta-fakta yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Jenis data dapat dilihat dari sudut sumbernya, dibedakan antara data yang di peroleh langsung dari masyarakat dan kepustakaan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan wawancara serta data skunder yanga diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah penelitian dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-

⁶ Ibid

⁷ ibid

buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan di bahas. Sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara identifikasi, editing, klasifikasi dan sistematis.

IV. PEMBAHASAN

NARKOBA

Awalnya kita dulu "sepakat" untuk menamai barang haram itu 'narkoba' dengan kepanjangan narkoba dan obat berbahaya. lama-kelamaan disadari bahwa kepanjangan narkoba tersebut keliru, sebab istilah obat "berbahaya" dalam ilmu kedokteran adalah obatobatan yang tidak boleh dijual bebas karena pemberiannya dapat membahayakan bila tidak melalui pertimbangan medis. Jenis obat seperti itu sangat banyak dan sifatnya tidak tergolong narkoba, misalnya antibiotik, obat jantung, obat darah tinggi, dan sebagainya. Semua obat tersebut adalah obat berbahaya, tetapi bukan narkoba. Kepanjangan narkoba yang tepat adalah narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif Lainnya. Banyak jenis narkoba dan psikotropika memberi manfaat yang besar bila digunakan dengan baik dan benar dalam bidang kedokteran. Narkoba dan psikotropika dapat menyembuhkan banyak penyakit dan mengakhiri penderitaan. Jasa narkoba dan psikotropika sangat besar dalam kehidupan di masa Lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Tindakan operasi (pembedahan) yang dilakukan oleh dokter harus didahului dengan pembiusan. Padahal, obat bius tergolong narkoba. Orang yang mengalami stres dan gangguan jiwa diberi obat-obatan yang tergolong psikotropika oleh dokter agar dapat sembuh. Dengan pengertian seperti itu, narkoba jelas tidak selalu

berdampak buruk. Banyak jenis narkoba yang sangat bermanfaat dalam bidang kedokteran. Karenanya, sikap antinarkoba adalah keliru. Yang benar adalah anti penyalahgunaan narkoba. Jadi, yang kita perangi bukan narkoba, melainkan penyalahgunaannya⁸

⁹Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada merosotnya kualitas manusia, tetapi juga meningkatnya jumlah dan kualitas kriminalitas. Jenis kejahatan bukan hanya kejahatan kecil, melainkan sudah menjadi kejahatan besar dan sadis, penipuan, penyiksaan, pembunuhan, sampai korupsi, kolusi, nepotisme, bahkan pengaturan personil pejabat. Dunia narkoba sangat erat dengan pelacuran, korupsi, manipulasi, serta kriminalitas. Demi narkoba, tidak jarang seorang anak tega membunuh saudara, ayah, ibu, kakek, atau neneknya. Narkoba dapat mengubah manusia menjadi kejam, tidak berperikemanusiaan, berbudi pekerti rendah, berperangai dan berakhlak lebih buruk dari binatang.

Ketidaktahuan tentang narkoba adalah awal pemakaian dan segala bencana. Ketidaktahuan tentang narkoba dan dampak negatifnya ternyata dapat berakibat fatal. Banyak penyalahguna narkoba yang tidak tahu bahwa yang dikonsumsi sesungguhnya adalah narkoba. Pedagang, pengedar, dan bandar narkoba memiliki strategi marketing yang sangat jitu, sehingga tanpa sadar rakyat dijerat masuk perangkap.

⁸ Dr subagyo Partodiharjo "Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya", Penerbit Erlangga

⁹ Ibid, Dr subagyo Partodiharjo "Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya", Penerbit Erlangga

Penyebab lain banyaknya orang yang mengonsumsi narkoba adalah

karena narkoba mudah didapat. Jaringan pengedar narkoba di Indonesia dengan cepat meluas, bukan hanya di kota besar, tetapi juga di kotamadya, bahkan desa-desa. Meluasnya jaringan narkoba didorong oleh rendahnya kualitas intelektualitas dan moralitas masyarakat dan buruknya kondisi sosial ekonomi.

POLITIK

Berbicara mengenai politik dan ilmu politik pada umumnya dapat menimbulkan persepsi yang berbeda-beda, hal ini dikarenakan pakar politik memberikan definisi atau pemahaman yang berbeda pula. Untuk memahami perbedaan dari kedua istilah tersebut, maka perlu dipahami apa yang dimaksud dengan politik dan ilmu politik. Harold D. Laswell mengutarakan bahwa politik¹⁰ merupakan sebuah pengetahuan yang membahas siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana

Selanjutnya Syarbaini dkk menyatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang membahas mengenai hubungan kekuasaan, yang mencakup sesama warga negara, antar warga negara dan negara serta hubungan sesama warga negara¹¹

Adapun pengertian dan definisi yang berbeda terkait politik, semuanya bermuara kepada bagaimana cara mewujudkan tujuan negara, atau dengan kata lain bagaimana upaya yang dilakukan untuk menggapai kehidupan yang lebih

¹⁰Harold Dwight Laswell, *Politics: Who Gets What, When, How* (Newyork: Wold Publishing Co, 1972)

¹¹ Syahrial Syarbaini, Rusdiayanta, and Doddy Wihardi, *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011)

baik. Dalam kenyataannya terdapat politik baik dan kotor. Politik yang bersifat

baik terjadi apabila aktor politik menjalankan wewenang dan kekuasaannya secara bersih dan amanah. Sedangkan politik yang bersifat kotor terjadi apabila aktor politik melakukan penyimpangan dalam menjalankan wewenang dan kekuasaannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa politik di dunia ini memiliki pro dan kontra atau dua unsur yang saling bertentangan.

Para ahli yang memandang kekuasaan sebagai sebuah inti dari politik beranggapan bahwa politik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan merebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Dimana kekuasaan dalam konteks ini dipahami sebagai sebuah hal atau upaya menyangkut kepentingan seluruh masyarakat

Menguraikan konsep kekuasaan politik kita perlu melihat pada kedua elemennya, yakni kekuasaan dari akar kata kuasa dan politik yang berasal dari bahasa Yunani *Politeia* (berarti kiat memimpin kota (*polis*)). Sedangkan kuasa dan kekuasaan kerap dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat gerak yang tanpa kehadiran kuasa (kekuasaan) tidak akan terjadi, misalnya kita bisa menyuruh adik kita berdiri yang tak akan dia lakukan tanpa perintah kita (untuk saat itu) maka kita memiliki kekuasaan atas adik kita. Kekuasaan politik dengan demikian adalah kemampuan untuk membuat masyarakat dan negara membuat keputusan yang tanpa kehadiran kekuasaan tersebut tidak akan dibuat oleh mereka.

¹²Bila seseorang, organisasi, atau suatu partai politik bisa

mengorganisasi, sehingga berbagai badan negara yang relevan misalnya membuat aturan yang melarang atau mewajibkan suatu hal atau perkara maka mereka mempunyai kekuasaan politik. Variasi yang dekat dari kekuasaan politik adalah kewenangan (*authority*), kemampuan untuk membuat orang lain melakukan suatu hal dengan dasar hukum atau mandat yang diperoleh dari suatu kuasa. Seorang polisi yang bisa menghentikan mobil di jalan tidak berarti dia memiliki kekuasaan tetapi dia memiliki kewenangan yang diperolehnya dari UU Lalu Lintas, sehingga bila seorang pemegang kewenangan melaksanakan kewenangannya tidak sesuai dengan mandat peraturan yang ia jalankan maka dia telah menyalahgunakan wewenangnyanya, dan untuk itu dia bisa dituntut dan dikenakan sanksi. Sedangkan kekuasaan politik, tidak berdasar dari UU tetapi harus dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku sehingga bisa tetap menjadi penggunaan kekuasaan yang konstitusional.

¹³Kekuasaan itu adalah Anugerah, karena kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk berkarya dan melayani masyarakat. Kekuasaan itu sebuah anugerah jika kekuasaan itu berjalan seiring dengan kebaikan dan keberpihakan kita kepada masyarakat serta dengan berkeadilan kepada masyarakat. Setiap kita manusia yang terlahir ke bumi pertiwi ini , didalam dinamika politik kehidupan kita ditakdirkan untuk berkuasa. Berbagai cara akan kita lakukan untuk mendapatkan kekuasaan itu. Mulai itu dari cara yang

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan_politik

¹³ <https://ilmupolitik.unja.ac.id/pilkada-serentak/>

halal dan cara yang tidak halal akan dilakukan oleh sebagian orang untuk mendapatkan kekuasaan itu. Perebutan kekuasaan itu bisa kita lihat sendiri dalam Kontestasi Politik Lokal ,seperti halnya Pilkada. Pilkada sering kali dijadikan lahan untuk perebutan kekuasaan.

Tapi nyatanya kekuasaan itu sering disalahgunakan oleh mereka yang memiliki kekuasaan , mereka acap kali melakukan tindakan-tindakan korupsi ,mereka tidak memikirkan nasib rakyat kecil , mereka lebih mementingkan kepentingan pribadinya atau golongannya ketimbang mementingkan masyarakat . demokrasi hanyalah sebatas jalan untuk yang berkuasa mengeruk harta demi kroni dan keluarganya. Padahal supaya mereka bisa memiliki kekuasaan kan karena adanya masyarakat yang menaruh kepercayaan kepada mereka ,supaya nasib rakyat bisa diubah kearah yang lebih bagus lagi. Tapi nyatanya Dan dengan melakukan hal semacam itu mengakibatkan masyarakat tidak percaya lagi kepada pemimpinnya. Dulu Dari atas panggung bicara manis –manis tapi dibawah meja menghisap sampai habis.¹⁴

¹⁵salah satu fungsi dari politik ini adalah untuk menampung aspirasi dari masyarakat. Parpol harus peka terhadap masyarakat, artikulasi ini akan dijalankan oleh parpol sebagai sarana penyaluran atau penyampaian aspirasi masyarakat untuk negeri tercinta ini. Parpol harus memperjuangkan aspirasi

¹⁴ <https://ilmupolitik.unja.ac.id/pilkada-serentak/>

¹⁵ <https://ilmupolitik.unja.ac.id/pilkada-serentak/>

dari rakyat ,karena melalui partai politik lah aspirasi dari masyarakat itu sampai kepada pemerintah.

Setiap individu maupun kelompok harus memiliki aturan yang mengatur kehidupannya agar dapat tercipta ketertiban dan keamanan di masyarakat. Hukum dibuat, dijalankan dan dipertahankan oleh suatu kekuasaan. Negara merupakan wadah tempat suatu kekuasaan direalisasikan. Berdasarkan kenyataan ini sudah nampak hubungan antara ilmu politik dan ilmu hukum, yaitu dalam proses penyelenggaraan negara sebagai pembentuk hukum dan dalam objek ilmu hukum itu sendiri. Ilmu politik juga menyelidiki hukum tetapi tidak menitik beratkan pada segisegi teknis dari hukum, melainkan menitik beratkan pada hukum sebagai hasil persaingan kekuatan-kekuatan sosial, sebagai hasil dari faktor- faktor kekuasaan

¹⁶Secara internasional regulasi narkoba diatur dan diperbincangkan oleh negara-negara di dunia melalui sidang Komisi Narkoba dan Obat-obatan. Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan internasional terkait, dan Lembaga Swadaya Masyarakat hadir melakukan deliberasi untuk menentukan regulasi narkoba, dan setiap pihak atau badan yang melakukan pemungutan suara membawa kepentingannya masing-masing.

¹⁷Di Indonesia beberapa bulan sebelum disahkannya UUCK, tepatnya di awal bulan tahun 2020 salah satu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS)

¹⁶ <https://s3pi.umy.ac.id/narkoba-itu-politik/>

¹⁷ <https://s3pi.umy.ac.id/narkoba-itu-politik/>

Rafli Kande dari Dapil Aceh mengusulkan ganja sebagai komoditas ekspor dalam bidang farmasi atau medis.

¹⁸Selain itu juga Menteri Pertanian mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian RI (Kepmentan) Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kepmentan perihal ganja yang masuk dalam tanaman obat walaupun kemudian dicabut, hal yang politis bukan. Pro dan kontra masih mewarnai dan terjadi dari kalangan politisi dan masyarakat mengenai narkoba yaitu ganja sebagai obat.

¹⁹Peneliti Transparency International Indonesia (TII), Sahel Muzzammil mengatakan, sejak beberapa tahun lalu pihaknya sudah “mendorong KPU” membuat aturan yang “mewajibkan partai politik menyertakan laporan keuangannya” ketika mendaftarkan kepesertaan pemilu. laporan itu juga harus bisa diakses publik, kata dia, agar publik bisa menilai kewajaran laporan keuangan tersebut.

²⁰Tanggal 29 Mei, KPU diundang untuk menghadiri rapat konsultasi atau rapat dengar pendapat berkenaan dengan rancangan PKPU pelaporan dana kampanye,” ujar Idham. Beberapa hal yang diatur dalam rancangan PKPU itu nantinya mencakup larangan bagi peserta Pemilu 2024 untuk menerima sumbangan dana kampanye dari beberapa sumber, kata Idham.

²¹Sumber-sumber yang dimaksud antara lain, pihak asing; penyumbang yang tidak jelas identitasnya; hasil tindak pidana yang telah terbukti

¹⁸ <https://s3pi.umy.ac.id/narkoba-itu-politik/>

¹⁹ <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cll141e6gdgo>

²⁰ <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cll141e6gdgo>

²¹ <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cll141e6gdgo>

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana termasuk penjualan narkoba.

V. KESIMPULAN

Narkoba merupakan salah satu faktor yang dapat mengancam ketahanan nasional. Fenomena Narkoba merupakan fenomena yang multidimensi, berkaitan ke seluruh aspek kehidupan mulai dari kesehatan, hukum, politik, sosial dan ekonomi.

Narkopolitik adalah jaringan peredaran narkoba yang melibatkan tokoh politik untuk kepentingannya. bahayanya dana dari transaksi narkoba masuk ke ranah politik. Hal ini dikenal dengan istilah narkopolitik.

Modus narkopolitik dilakukan tokoh tertentu dengan memanfaatkan suatu organisasi, rata-rata berperan sebagai otak atau bandar jaringan narkoba yang terjun ke dunia politik secara langsung. Atau setidaknya mendanai orang-orang yang ingin terjun ke dunia politik. Namun, selain tingkat daerah, dana narkopolitik bisa jadi juga sudah masuk ke ranah politik di tingkat pusat. Ini sangat berbahaya karena bisa mempengaruhi kebijakan dan peraturan perundangan yang bisa melemahkan pemberantasan narkotika. mengambil contoh Pablo Escobar Pada Tahun 1982. Gembong narkotika asal Meksiko tersebut adalah orang yang pernah duduk di DPR-nya negara Amerika Tengah itu, bahkan menjadi calon presiden, "Escobar telah merasuki berbagai sisi kehidupan negara dan masyarakat. Sehingga, dia bisa mempengaruhi kebijakan yang lebih berpihak dan melindungi sindikat narkoba," Tentu saja, Indonesia

tidak ingin seperti itu. Maka dari itu, perlu adanya langkah-langkah

pencegahan agar siapapun yang akan mencalonkan diri sebagai caleg daerah dan pusat harus melalui tes narkoba, aliran dana kampanye dipublikasikan ke public agar mengetahui perputaran dana yang di terima para calon peserta pilkada dan parlemen serta memperketat pemberian catatan bersih dari kejahatan. Di sisi lain perlu juga peran penyelenggara pemilu lebih agresif memantau dan mengawasi dana-dana yang di peroleh oleh peserta pemilu, demi terwujudnya indonesia yang bersih dan Amanah dalam melaksanakan fungsi kelembagaan dan organisasi yang ada di pemerintahan maupun di parlemen.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Administrator, Tahun 2023, Uji Publik BNN Penelitian Pengukuran Pravelensi
Penyalahgunaan Narkoba;

Miriam Budiardjo, Tahun 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2008);

Setiyawati, dkk, Tahun 2015, Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 1, (Surakarta, Tirta
Asih Jaya);

Dr subagyo Partodiharjo, "Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya",
Penerbit Erlangga;

Harold Dwight Laswell, Politics: Who Gets What, When, How (Newyork: Wold
Publishing Co, 1972;

Syahrial Syarbaini, Rusdiayanta, and Doddy Wihardi, Tahun 2011, Pengetahuan
Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Ghalia Indonesia);

INTERNET

1. <https://universitasjakarta.ac.id/books/tindak-pidana-narkotika-lex-specialis-derogat-legi-generalis/>
2. <https://id.wikipedia.org/wiki/Politik>
3. https://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan_politik
4. <https://ilmupolitik.unja.ac.id/pilkada-serentak/>
5. <https://s3pi.ummy.ac.id/narkotika-itu-politik/>
6. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c11141e6gdgo>